

RINGKASAN

Maulana Rifki, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Dosen Pembimbing I: Rakhma Nurrozalina, S.H., M.H. dan Dosen Pembimbing II: Kartika Winkar Setya, S.H., M.H..

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap seni pertunjukan *Dames* di Kabupaten Purbalingga sebagai Warisan Budaya Takbenda”. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum serta mengkaji peran pemerintah daerah dalam pelestarian seni pertunjukan *Dames* agar terhindar dari kepunahan dan penyalahgunaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang didukung dengan data lapangan melalui wawancara untuk memperkuat analisis implementasi hukum di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun seni pertunjukan *Dames* telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) melalui Keputusan Mendikbudristek Nomor 315/M/2023, perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat administratif. Status tersebut belum memberikan kepastian hukum yang kuat karena belum ditindaklanjuti dengan pencatatan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dalam rezim Hak Cipta.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Warisan Budaya Takbenda (WBTb), Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), Seni Pertunjukan *Dames*.

SUMMARY

Maulana Rifki, *Law Study Program, University of Nahdlatul Ulama Purwokerto. Advisor I: Rakhma Nurrozalina, S.H., M.H. and Advisor II: Kartika Winkar Setya, S.H., M.H..*

This research is titled “Legal Protection of Dames Performing Arts in Purbalingga Regency as Intangible Cultural Heritage.” The purpose of this study is to analyze the forms of legal protection and examine the role of local government in preserving Dames performing arts to prevent extinction and misuse. The research method used is normative juridical with a statute approach (pendekatan perundang-undangan) and a case approach (pendekatan kasus). The research data are sourced from primary and secondary legal materials, supported by field data through interviews to strengthen the analysis of legal implementation in the field.

The results show that although Dames performing arts have been designated as Intangible Cultural Heritage (WBTb) through the Decree of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 315/M/2023, the legal protection provided is still administrative. This status has not provided strong legal certainty because it has not been followed up with registration as Communal Intellectual Property (KIK) under the Copyright regime. Furthermore, it was found that local government regulations have not been optimal in providing concrete legal protection for the sustainability of these performing arts.

Keywords: Legal Protection, Intangible Cultural Heritage (WBTb), Communal Intellectual Property (KIK), Dames Performing Arts.